



IHDN DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar



A. LATAR BELAKANG

Dalam perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN 2005-2025), telah ditetapkan empat tahapan pokok pembangunan nasional jangka menengah lima tahunan. Keempat tahapan pokok tersebut adalah: (1) *Tahap Pertama (2005-2009)*; menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) *Tahap Kedua (2010-2014)*; memantapkan penataan NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian; (3) *Tahap Ketiga (2015-2020)*; memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek; dan (4) *Tahap Keempat (2020-2024)*; mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sejalan dengan PJPN 2005-2025 tersebut, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, Kementerian Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

Mengacu pada restra Kementerian Agama diatas, sesungguhnya embrio keberadaan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, secara historis dapat ditelusuri dari eksistensi sebuah lembaga pendidikan agama yakni sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar, di bawah naungan Yayasan Dwijendra yang telah berdiri sejak tahun 1959. Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar berubah statusnya menjadi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar pada tahun 1968. Eksistensi lembaga pendidikan ini memiliki peran penting pada waktu itu untuk menyiapkan tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Seiring kebijakan pemerintah, yang menghendaki adanya peningkatan kualifikasi pendidikan para guru di tingkat dasar dan menengah yang menghendaki adanya peningkatan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengajar, maka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Hindu, Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihentikan operasionalnya pada tahun 1990. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang harus berpendidikan tinggi atau memiliki ijazah yang minimal setingkat Diploma Dua atau Diploma Tiga berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar pada tahun 1993 dengan menggunakan seluruh aset bekas PGAHN Denpasar dan PGAHN Singaraja.

Tuntutan kualifikasi guru dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Diploma tersurat pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Atas perjuangan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha baik pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gde Putra dan I Ketut Pasek, yang didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bali dr. Ida Bagus Oka dan pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah, maka pemerintah c.q. Menteri Agama mengeluarkan surat Keputusan No. 58 B tanggal 25 Mei 1993 tentang Pendirian APGAHN Denpasar, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI, Dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 25 Mei 1993, dengan membuka Program Studi Diploma 2 (D.2) dan

Diploma 3 (D.3) Jurusan Pendidikan Agama Hindu sekaligus pelantikan Direktur APGAHN yang pertama.

Lahirnya APGAHN Denpasar tidak mengendorkan perjuangan untuk terus meningkatkan status, dimulai sejak tanggal 20 September 1996, yang didukung sepenuhnya oleh para tokoh Hindu diantaranya Mayjen Ir. I Wayan Gunawan (Dirjen Bimas Hindu dan Buddha), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Menteri BKKBN dan Kependudukan), Drs. I Dewa Made Beratha (Gubernur Bali), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pejabat terkait di tingkat Pusat maupun Daerah serta Lembaga Sosial Keagamaan Hindu. Atas berbagai upaya yang dilakukan, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar (STAHN Denpasar) yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. Ing BJ Habibie), dengan membuka empat jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Jurusan Filsafat Agama Hindu.

Pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama (Prof. Drs. Malik Fajar, M.Sc.), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si sebagai Ketua STAHN Denpasar yang pertama pada tanggal 9 September 1999 dengan hanya menjabat selama 9 (sembilan) bulan karena Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si., dimutasi menduduki jabatan sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI. Selanjutnya jabatan Ketua STAHN Denpasar dipercayakan kepada Dr. I Made Titib yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2000.

Pada masa kepemimpinan Dr. I Made Titib, pengelolaan STAHN Denpasar terus diarahkan pada penataan dan peningkatan sarana prasarana bidang akademik sehingga eksistensi perguruan tinggi Hindu negeri satu-satunya di Indonesia kala itu dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, segenap *stakeholder* dan pemimpin STAHN Denpasar berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam bidang pendidikan dengan membuka PPs.

Strategi pertama yang dilakukan Ketua STAHN Denpasar (Dr. I Made Titib) adalah membentuk Tim dengan menunjuk Drs. Made Redana, M.Si untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan kajian kelayakan administratif dan akademis pendirian Program Pascasarjana (PPs).

Berkat *asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan dukungan dari berbagai pihak, upaya mewujudkan PPs. berhasil, dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, No. H/SK/30/2001 tertanggal 28 Mei 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan PPs STAHN Denpasar dengan Konsentrasi Brahma Widya (Teologi Hindu). Kemudian pada tahun 2003 melalui SK Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs. Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.

Beragam tantangan dan hambatan dihadapi dalam pengelolaan PPs, *stakeholder* bertekad untuk mewujudkan visi, sebagai kristalisasi komitmen dan tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas akademik dan profesional pegawai dan dosen, sesuai tuntutan globalisasi. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi yaitu berilmu, berwawasan luas, menguasai teknologi, memiliki *sraddha* dan *bhakti* yang kokoh melalui sistem pendidikan PPs. yang efektif dan efisien. Kepemimpinan Dr. I Made Titib tidak lama, karena pada tanggal 25 Februari 2002 diangkat sebagai Direktur Urusan Agama Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama RI di Jakarta dan sebagai penggantinya dipilih Drs. I Gede Rudia Adiputra yang dilantik tanggal 8 Maret 2002.

Upaya peningkatan institusi terus dilakukan melalui pengajuan proposal yang mendapat dukungan dari semua perguruan tinggi negeri di Bali, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, maupun Majelis Umat (Parisada) termasuk DPRD Bali dan para anggota DPD RI pada waktu itu. Berdasarkan usul peningkatan STAHN Denpasar menjadi Institut, akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2004 terbit Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang perubahan STAHN Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN Denpasar), dan selanjutnya diresmikan pada tanggal 23 Maret 2005 di Bangli oleh Menteri Agama (H. Maftuh Basyuni).

Rektor Pertama IHDN Denpasar untuk masa jabatan 2005-2009 adalah Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., yang dilantik tanggal 7 Juli 2005. Pada masa kepemimpinan Drs I Gede Rudia Adiputra.,M.Ag, sebagai Rektor IHDN Denpasar, dilanjutkan dengan proses akreditasi semua jurusan/program studi dengan terus melakukan penataan administrasi

akademik. Pengembangan bidang fisik dilanjutkan dengan pembangunan Gedung PPs. di Jalan Kenyeri No. 57 Denpasar dan mulai persiapan pengembangan lahan untuk gedung di Jalan Kenyeri Gang Sekar Kemuda Denpasar. Dibangun pula Gedung Asrama Putri di areal Kampus Bangli dengan dana DIPA IHDN Denpasar. Gedung Asrama Putra dibangun di bagian Timur Gedung Rektorat di Bangli dengan bantuan sepenuhnya dari Pemprov Bali. Pada Kampus induk di Jalan Ratna Denpasar dilakukan purnapugar (pemugaran dan meninggikan serta memperluas areal) *Parahyangan* dan diberi nama Pura Ratna Saraswati, sekaligus dengan upacara peresmian (*pemlaspasan*). Pada tanggal 21 Agustus 2009 dilaksanakan pelantikan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. sebagai Rektor IHDN Denpasar untuk masa bhakti 2009-2013 oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Kementerian Agama RI Jakarta.

Pergantian kepemimpinan ini memberikan nuansa baru bagi dinamika kampus, disertai penciptaan iklim akademik yang lebih progresif. Hal tersebut didukung dengan pengembangan program-program yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas melalui peningkatan pendidikan ke luar negeri, pengembangan teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan membangun jaringan yang lebih luas. Dilakukan juga studi banding di dalam dan luar negeri seperti ke India dan Nepal (2010), perbaikan manajemen pendidikan dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perguruan tinggi. Setelah masa bhakti Prof. Dr. I Made Titib., Ph.D. berakhir, dilanjutkan oleh Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. untuk masa bhakti 2013-2017 yang dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2013. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. kampus II IHDN Singaraja diresmikan oleh Menteri Agama RI (H. Lukman Hakim Saifudin) menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja pada tanggal 22 Maret 2016.

Pengembangan IHDN Denpasar selama lima tahun terakhir berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan IHDN Denpasar yang merupakan proses penegasan posisi sebagai perguruan tinggi keagamaan Hindu satu-satunya di Indonesia. Pada fase lima tahun terakhir, IHDN Denpasar telah melakukan berbagai perbaikan mutu akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembukaan jurusan/program studi (Prodi) baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat, serta memperluas jaringan kerja sama. Hal tersebut

merupakan upaya untuk mencapai visi IHDN Denpasar. Upaya mewujudkan visi tersebut pada dasarnya merupakan komitmen IHDN Denpasar untuk turut aktif dalam pembangunan Indonesia melalui pendidikan Hindu.

Berdasarkan itulah, dalam empat tahun ke depan, pengembangan IHDN Denpasar akan fokus kepada integrasi ilmu, kearifan lokal, pendidikan moral dan *religious culture*, pengembangan kampus berbasis kearifan lokal, dan peningkatan akses terhadap perguruan tinggi. Fokus tersebut dijiwai arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014 yang tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2010 yaitu peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (*research university*) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (*world class university*); (c) penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan road map penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Substansi yang ter tuang dalam Renstra ini tidak akan bergeser dari misi utama perguruan tinggi yakni Tridarma Perguruan Tinggi yang terus diperkaya dengan berbagai inisiatif sesuai dengan dinamika masyarakat dan internal IHDN Denpasar.

B. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofi dan prinsip dasar Rencana Strategis IHDN Denpasar 2017-2021 adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Rencana Strategis IHDN Denpasar ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pada Rencana Strategis Kementerian Agama, landasan filosofis sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai, seperti: agama dan kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa Pendidikan Tinggi berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Rencana Strategis IHDN Denpasar 2017-2021 dilandasi filosofi yang memberikan semangat untuk mewujudkan SDM yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
1. Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi.

K. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dari setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan target terukur yang harus dicapai IHDN Denpasar selama empat tahun kedepan. Indikator kinerja ini juga merupakan indikator keberhasilan program yang dilaksanakan oleh civitas akademika. Berikut ini adalah matriks indikator kinerja utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya status akreditasi kelembagaan tingkat program studi dan institut	20% program studi pada fakultas dan pascasarjana terakreditasi A oleh BAN PT	6,25%	6,25%	6,25%	10%	20%
		Institut/universitas terakreditasi B oleh BAN PT	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan Kependidikan	15% dosen berkualifikasi Guru Besar.	5,23%	7,18%	9,15%	11,11%	15%
		50% dosen berkualifikasi pendidikan S-3	24,8%	31,3%	37,9%	43,03%	50%
		15% tenaga kependidikan menjabat sebagai tenaga fungsional khusus.	3,84%	6,4%	8,97%	11,53%	15%
3	Meningkatnya status lembaga, jumlah fakultas, dan jumlah program studi pada pascasarjana dan fakultas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Transformasi kelembagaan menjadi Universitas Hindu Negeri Jayapangus	IHDN	UHNJP	UHNJP	UHNJP	UHNJP
		Tujuh fakultas	3	4	5	6	7
		Tiga puluh Prodi di tingkat Fakultas	16	19	22	25	30
		Sembilan Prodi di tingkat Pascasarjana	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa Sanskerta dan Inggris dan kualitas <i>sraddha/bhakti</i> mahasiswa melalui pasraman	Seluruh mahasiswa baru mengikuti program pasraman selama tiga bulan	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln
		Seluruh mahasiswa mengikuti pembelajaran bahasa asing melalui Pusat Pengembangan Bahasa selama tiga bulan (20 pertemuan)	1	2	3	3	3
		Mendapat nilai TOEFL minimal 400.	400	400	400	400	400
5	Teguhnya kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar di kawasan regional, nasional, dan internasional	Berdiri dua lembaga-lembaga nonstruktural yang secara intensif dan berkesinambungan melakukan kajian terhadap kekhasan kajian	1	1	2	2	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
		keilmuan IHDN Denpasar					
		Sepuluh judul penelitian per tahun yang mengkaji tentang kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar	2	4	5	6	10
		Tersedianya seribu judul literatur yang berisi kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar	250	250	500	700	1000
		Tersedianya dua belas judul (tiga judul per fakultas) buku ajar yang mengintegrasikan kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar dengan bidang mata kuliah	3	3	4	6	12
6	Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen	Dua puluh lima judul artikel diterbitkan pertahun pada jurnal terakreditasi nasional	3	3	5	10	20
		Empat jurnal ilmiah yang dibiayai DIPA menuju terakreditasi nasional	1	2	2	2	4
7	Meningkatnya peran dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset	Memiliki sepuluh desa binaan yang tersebar pada 60% kabupaten /kota di Bali dengan program yang berkelanjutan	1	3	5	7	10
		Memiliki lima mitra dalam pemberdayaan masyarakat	1	1	3	4	5
		Lima penelitian per tahun sebagai basis pengabdian masyarakat	5	5	5	5	5
		Terlaksananya empat Program Pengabdian	1	1	2	3	4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Kepada Masyarakat, selain Kuliah Kerja Nyata, oleh Dosen dan mahasiswa pertahun.					
8	Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/ non akademik	Tiga unit kerja meraih sertifikat ISO 9001: 2015	0	0	0	1	2
		1% anggaran dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan.	0,04%	0,25%	0,35%	0,5%	0,75%
		Tersedianya sarana dan prasana sesuai standar nasional pendidikan	50%	50%	60%	75%	90%
9	Meningkatnya tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja	40% lulusan terserap di sektor formal	25%	25%	30%	32,5%	35%
		60% lulusan terserap di sektor non-formal	30%	35%	40%	45%	50%
10	Meningkatnya reputasi positif IHDN Denpasar di kawasan regional, nasional, dan internasional	Lima puluh topik publikasi lembaga pertahun yang dimuat pada media cetak regional Bali	10 topik	10	10	10	10
		Dua puluh lima topik publikasi pada media cetak atau online bereputasi nasional	5 topik	5	5	5	5
		Website resmi IHDN Denpasar menduduki peringkat 100 besar di Indonesia versi Webometric	500	450	400	200	100
11	Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran.	Enam puluh kerja sama dalam skala regional	10	10	10	15	15
		Empat puluh kerja sama skala nasional	5	5	10	10	10
		Lima kerja sama skala internasional	1	1	1	1	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
12	Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi	Persentasi bantuan hibah alumni bagi lembaga sebesar 5 % dari PNBPN pertahun	5%	5%	5%	5%	5%

K. PENUTUP

Rencana strategis ini disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis 2017-2021 pada unit-unit kerja di lingkungan IHDN Denpasar dan Rencana Operasional yang disusun setiap tahun. Hal lain yang tidak tertuang dalam dokumen ini akan ditetapkan dalam dokumen lain.



Denpasar, 27 Desember 2018

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

